

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS SOSIAL  
PEMERINTAH KOTA SOLOK**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Solok dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah dan pemenuhan terhadap pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” yaitu mengamanatkan Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Informasi dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial disajikan secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2023 berisikan informasi keberhasilan/kegagalan, evaluasi dan analisa pencapaian sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen perubahan Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Dinas Sosial akan selalu mengupayakan peningkatan kinerja di masa yang akan datang dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan yang akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2023, diucapkan terima kasih

Solok, Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial

**ZULFADLI, SH. MP**  
NIP. 19640129 199901 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I      PENDAHULUAN.	
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Gambaran Umum	2
1.3    Penghargaan	3
1.4    Kewenangan Dan Data Umum Organisasi	4
1.5    Sistematika Penulisan	6
BAB II     PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1    Rencana Strategis	7
2.2    Perjanjian Kinerja	12
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.	
3.1    Evaluasi Analisis Capaian Kinerja	14
3.2    Perbandingan Capaian Kinerja	21
3.3    Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV    PENUTUP	
4.1    Kesimpulan	24
4.2    Saran	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip *clean government* dan *good governance* dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Selain itu instansi pemerintah yang akuntabel tentunya akan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian maka sangatlah perlu disusun sebuah laporan kinerja instansi pemerintah yang dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pula transparansi dalam pemerintahan sehingga dapat lebih membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Guna lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Kinerja (Lkj). Dokumen Lkj bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKj 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2023. LKj adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja

suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen PK merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

## **1.2. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kota Solok merupakan unsur pelaksana penyelenggara tugas Walikota di bidang Sosial.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yaitu manusia.

Suatu organisasi akan mampu mengembangkan potensinya, hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya, bagaimana sistem informasi dan teknologi yang diterapkan, seberapa besar kompetensi yang dimiliki. Dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat.

Dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam tulisan ini antara lain jumlah pegawai, status kepegawaian dan tingkat pendidikan.

Dilihat dari perspektif sumber daya manusia, tahun 2023 Dinas Sosial memiliki SDM sebanyak 45 Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 19 orang dan Non PNS Sebanyak 26 orang, dengan komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2:

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1	0	0	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	0	1	1
3	SMA Sederajat	2	0	7	4	13
4	D1 / D3 / D4	0	1	1	2	4
5	S1	1	8	4	7	20
6	S2	4	2	0	0	6

Dari jumlah pegawai sebanyak 45 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai/PNS berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel 1.3:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2023**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1		1
2	Golongan II	2	1	3
3	Golongan III	2	8	10
4	Golongan IV	3	2	5

### 1.3. PENGHARGAAN

Pada tahun 2023, Dinas Sosial kota Solok tidak mendapatkan penghargaan.

#### **1.4. KEWENANGAN DAN DATA UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kota Solok merupakan unsur pelaksana penyelenggara tugas Walikota di bidang Sosial.

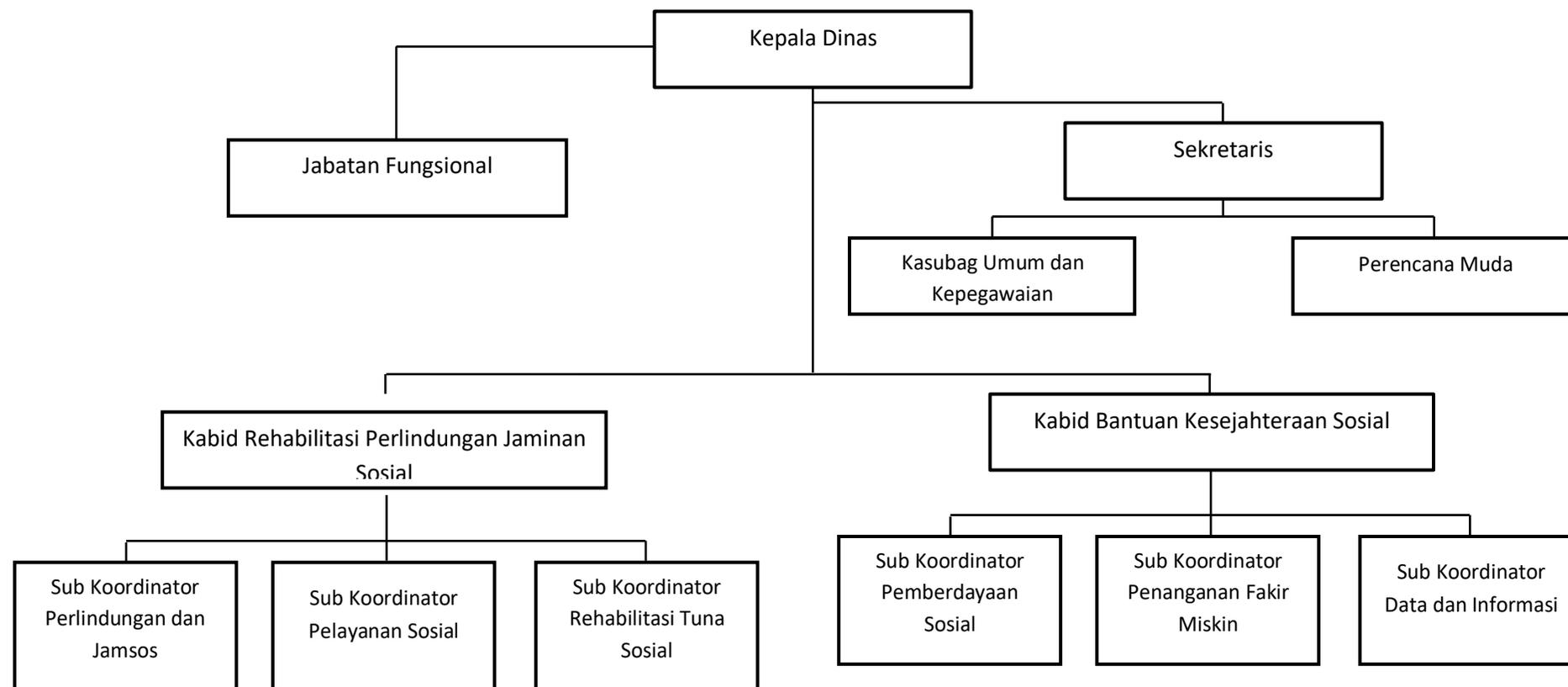
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- Penyelenggaraan pelayanan umum di Bidang Sosial;
- Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**GAMBAR 1.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA SOLOK**



## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) tahun 2023 Dinas Sosial Kota Solok, adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. GAMBARAN UMUM
- 1.3. PENGHARGAAN
- 1.4. KEWENANGAN DAN DATA UMUM ORGANISASI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

- 2.1. RENCANA STRATEGIS
- 2.2. PERJANJIAN KINERJA

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023  
DENGAN TAHUN 2022
- 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

### **BAB IV PENUTUPAN**

### **LAMPIRAN**

1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

## **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Solok bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu:

### **“Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat”**

Sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kota Solok yaitu **Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern.**

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Solok telah menetapkan 6 program wajib dengan 16 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan anggaran Rp.5.454.420.289,-

### **2.1.RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Solok merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Solok dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kota Solok, yaitu:

#### **2.1.1 VISI**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kota Solok adalah **“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi,**

## **Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Solok sebagai kota berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, social, ekonomi, dan budaya.

### **2.1.2 MISI**

Guna mewujudkan Visi tersebut dirumuskan menjadi empat misi pembangunan daerah, yaitu:

Misi Pemerintah Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.
- b. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
- d. Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan.
- e. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berpedoman pada RPJMD Kota Solok tahun 2021-2026, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi

pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Solok tersebut adalah pada misi 3 (tiga) yaitu **“Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial”**.

Misi Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial dengan tujuan **“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat”**, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Model tersebut membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan Garis Kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan ini akan selalu dinamis mengikuti perkembangan inflasi dan harga pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin Kota Solok sebanyak 2.280 jiwa sedangkan jumlah penduduk sebanyak 75.850 jiwa berdasarkan kriteria BPS (Sumber : Solok Dalam Angka 2023).

### **2.1.3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dinas Sosial Kota Solok dalam menyusun tujuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan tujuan RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Solok Tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan diselaraskan dengan rumusan sasaran pembangunan Kota Solok Tahun 2021-2026, untuk dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan maka disusunlah rumusan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Solok Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin;
- b. Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Hubungan tujuan, sasaran dengan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel 2.1:

**Tabel 2.1**

**Tujuan, sasaran dengan indikator kinerja utama**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif Persentase penurunan data error DTKS

Program yang dirumuskan di sini merupakan bentuk upaya yang akan dilakukan dalam rangka merespon berbagai masalah yang ada dengan berorientasi pada visi dan misi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Dina Sosial Kota Solok.

Perumusan program utama ini sekaligus merupakan implementasi perencanaan strategik yang mencakup program-program dan kegiatan yang dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu tahun 2023.

Beberapa program yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial.

Program Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecataman, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Forum CSR Kesejahteraan Sosial) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk membantu Penanganan PPKS melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial PPKS, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial. Upaya pelayanan bagi PPKS tersebut diarahkan untuk penyediaan permakanan, penyediaan

sandang, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, serta Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini melaksanakan Bimbingan teknis untuk petugas Verifikasi dan validasi, Sosialisasi DTKS, Koordinasi dengan pendamping PKH dan Bimtek peningkatan kapasitas SDM PKH, Korda, serta Korkot.

4. Program Penanganan Bencana

Program ini melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok rentan, melakukan opsik gudang bencana, melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk Tagana.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

**2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Solok dapat dilihat dari tabel 2.2:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran, Indikator dan Target**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Ket
1	2	3	4	5
1	1. Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan	88,71%	IKD
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100 %	IKD
	2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Persentase penurunan data error DTKS	6,33%	IKD

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Serta Definisi Operasional dapat dilihat pada tabel 2.3:

**Tabel 2.3**

**Tujuan, Sasaran, Indikatoar Kinerja dan Target Kinerja Serta Definisi Operasional**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023	Definisi Operasional
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan	%	88,71%	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani bantuan}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$
		2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	100 %	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$
			Persentase data error DTKS	%	6,33%	Data error dalam DTKS terdiri dari inclusion error dan exclusion error. Inclusion error meliputi data yang terdapat dalam DTKS yang harus dikeluarkan setelah validasi data (meninggal, migrasi, KK ganda, perceraian) Exclusion error adalah data yang seharusnya masuk DTKS setelah dilakukan validasi (masyarakat miskin yang belum masuk DTKS) $\frac{\text{Jumlah data inclusion error} + \text{exclusion error}}{\text{Jumlah data DTKS}} \times 100\%$

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja tahun 2023 adalah inktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta merupakan penjabaran dari pencapaian rencana atau target dari tujuan Dinas Sosial Kota Solok yaitu **“MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT ”** pada Tahun 2023.

Adapun Sasaran Dinas Sosial Kota Solok yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- b. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin;

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kota Solok untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kota Solok Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Rumus untuk mencari Presentase dalam pengukuran Kinerja:

1. Untuk mengukut semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk mengukur semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dilakukan pengukuran keberhasilan setiap indikator. Perhitungan tingkat capaian dilakukan menggunakan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran program digolongkan menjadi 4 (empat) skala pengukuran, dengan kategori sebagai berikut:

- a. Lebih dari 100% = Sangat baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55% = Kurang (K)

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Sosial Kota Solok telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Solok Tahun 2023 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel 3.1:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan	%	88,71	94,30	106,30
2		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	100	100,00	100,00
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Persentase penurunan data error DTKS	%	6,33	3,19	149,61

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1:**

**“Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**

**Indikator 1.**

Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran tersebut di atas, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut:

Indikator 1	Capaian Tahun 2023		
	Target (%)	Realisasi (%)	%
Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan	88,71	94,30	106,30

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Solok untuk sasaran 1 dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan adalah berhasil. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebanyak 106,30% ini menunjukkan kinerja Dinas Sosial meningkat/ berhasil. Karena untuk indikator pada sasaran 1 ini memakai rumus **semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja**, dimana realisasi 94,30% dari yang ditargetkan sebesar 88,71% dengan capaian yang didapat sebesar 106,30%.

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator sasaran “Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan” ini adalah sebagai berikut:

**A. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

**I. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 133 orang dan realisasi 133 orang (100%).
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 3 orang dan realisasi 3 orang (100%).
3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 21 orang dan realisasi 21 orang (100%).

## **II. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

1. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 985 orang dan realisasi 688 orang (70%).
2. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 24 orang dan realisasi 7 orang (29%).
3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah

Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 60 orang dan realisasi 60 orang (100%).

4. Sub Kegiatan Pemberian Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%).

## **B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

### **I. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 1500 orang dan realisasi 2125 orang (142%).

#### **Sasaran 2:**

**“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin”**

#### **Indikator 1.**

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran tersebut di atas, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut:

Indikator 1	Capaian Tahun 2023		
	Target (%)	Realisasi (%)	%
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	100

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Solok untuk sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif adalah berhasil, Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100% ini menunjukkan kinerja Dinas Sosial meningkat/ berhasil. Karena untuk indikator pada sasaran 1 ini memakai rumus **semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja**, dimana realisasi 100% dari yang ditargetkan sebesar 100% dengan capaian yang didapat sebesar 100%

Adapun Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator sasaran “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif” ini adalah sebagai berikut:

#### **A. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

##### **I. Kegiatan Pengembangan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 104 orang dan realisasi 104 orang (100%).
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 3718 orang dan realisasi 3718 orang (100%).

3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 9 lembaga dan realisasi 9 lembaga (100%).
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 15 sertifikat dan realisasi 15 sertifikat (100%).

**Sasaran 2:**

**“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin”**

**Indikator 2.**

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran tersebut di atas, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut:

Indikator 1	Capaian Tahun 2023		
	Target (%)	Realisasi (%)	%
Persentase penurunan data error DTKS	6,33	3,19	149,61

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Solok untuk sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase penurunan data error DTKS adalah berhasil, Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebanyak 3,19 ini menunjukkan kinerja Dinas Sosial meningkat/berhasil. Karena untuk indikator pada sasaran 2 ini memakai rumus **semakin mendekati nol (0) realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin jauh realisasi dari nol (0) menunjukkan semakin rendahnya kinerja**, dimana realisasi 3,19 dari yang ditargetkan sebesar 6,33 dengan capaian yang didapat sebesar 149,61.

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator sasaran “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif” ini adalah sebagai berikut:

#### **A. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

##### **I. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari subkegiatan ini adalah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata dengan target 1528 orang dan realisasi 1725 orang (113%).

#### **3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022**

Tabel berikut ini menginformasikan capain kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan indikator sasaran dari Dinas Sosial Kota Solok :

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja		% Naik/ Turun
		2022	2023	
1	Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan	101,95	106,30	Naik
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	-
3	Persentase penurunan data error DTKS	188,76	149,61	Turun

Tahun 2023 Dinas Sosial berpedoman pada sasaran yang terdapat pada Rencana Strategis 2021 s/d 2026. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 ini tercapai. Hal ini tidak lepas dari kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah terkait, masyarakat dan pihak-pihak lainnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari PSKS di Kota Solok untuk mendukung program kegiatan Dinas Sosial Kota Solok dalam upaya penanganan PPKS dan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya tidak bisa diprediksi, tergantung situasi/kondisi di lapangan seperti pemakaman jenazah terlantar dan bencana baik itu bencana alam maupun bencana sosial, untuk realisasinya mengikuti peristiwa/kejadian yang ada.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Sosial hanya terbatas pada APBD Kota Solok tahun 2023 pada DPA Dinas Sosial. Realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran urusan wajib pada Dinas Sosial Kota Solok**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	PROGRAM	Anggaran Tahun 2023		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	218.600.960	213.805.310	97,81
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	564.371.080	519.059.717	91,97
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	423.898.730	378.023.756	89,18
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	73.274.400	60.938.400	83,16
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	7.938.000	7.862.000	99,04
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.288.083.170</b>	<b>1.179.689.183</b>	<b>91,58</b>

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dari total Anggaran Program untuk urusan Wajib yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.1.288.083.170,- terealisasi Rp. 1.179.689.183,- atau 91,58%. Sisa anggaran sebesar Rp. 108.243.987,- atau 8,42% antara lain bersumber dari :

- Efisiensi anggaran dan sesuai kebutuhan;
- Adanya kegiatan yang dilaksanakan bila ada kejadian bencana alam dan bencana sosial.
- Adanya Kegiatan yang dilaksanakan bila sudah ada mayat atau orang terlantar
- Adanya anggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (notebook) tidak dapat direalisasikan karena harga pasar terlalu tinggi (dengan spesifikasi yang telah ditentukan) dibandingkan dengan harga dalam DPA.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1.KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan dalam 3 (tiga) bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Sosial tahun 2023 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Dinas Sosial yang memberikan informasi kepada *stakeholders* atas keberhasilan/ kegagalan dengan 3 Indikator Kinerja Utama Dinas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2023.
- b. Untuk pencapaian 2 sasaran strategis tersebut telah dialokasikan anggaran untuk urusan wajib sebesar Rp.1.288.083.170,- terealisasi Rp. 1.179.689.183,- atau 91,58%.

### **4.2. SARAN**

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Dinas Sosial selalu mengupayakan penguatan akuntabilitas kerjanya. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen pejabat pimpinan tinggi sampai ke seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Menyelaraskan penerapan Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkesimbangan.
3. Meningkatkan pemahaman aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Solok tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penduduk miskin melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi berdasarkan updating data kemiskinan secara terpadu di Kota Solok.
5. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam balai sehingga kebutuhan dasar, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial warga binaan balai dapat terpenuhi.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Sosial Kota Solok secara lebih intensif.

*Solok, Januari 2024*  
**Kepala Dinas Sosial  
Kota Solok**

**ZULFADLI, SH. MP**  
NIP. 19640129 199901 1 001

**LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	KODE				Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN					Capaian %	
						Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi	Satuan		
1	2				3	4	5	6			7	8	9	10
					<b>TOTAL</b>	<b>5,454,420,289</b>	<b>4,627,571,709</b>							
					<b>NON URUSAN</b>	<b>4,166,337,119</b>	<b>3,447,882,526</b>							
<b>A.</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>4,166,337,119</b>	<b>3,447,882,526</b>							
<b>I</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26,626,700</b>	<b>25,644,900</b>							
1	1	06	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,419,600	7,047,900	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	Dokumen	100%	
								Hasil	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	85	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	penunjang urusan pemerintah					
2	1	06	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,478,700	3,185,000	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4	Dokumen	100%	
								Hasil	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	85	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	penunjang urusan pemerintah					
3	1	06	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,853,800	1,774,000	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	Laporan	100%	
								Hasil	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	85	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	penunjang urusan pemerintah					



No	KODE					Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN				Capaian %	
							Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi		Satuan
1	2					3	4	5	6		7	8	9	10
9	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,463,300	14,295,000	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	paket	100%
									Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah				
10	1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,050,000	20,050,000	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	paket	100%
									Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah				
11	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,011,170	17,001,300	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	paket	100%
									Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah				
12	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,551,800	6,551,800	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	paket	100%
									Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah				
13	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154,205,200	151,555,028	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan	100%
									Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah				
V	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927,649,060	905,579,598						
14	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,220,000	541,000	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan	100%

No	KODE				Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN				Capaian %		
						Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi		Satuan	
1	2				3	4	5	6		7	8	9	10	
								Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah					
15	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,431,060	41,070,848	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan	100%
								Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah					
16	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	874,998,000	863,967,750	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	Laporan	100%
								Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah					
<b>VI</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>232,440,020</b>	<b>202,583,450</b>						
17	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166,665,000	140,150,950	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	unit	100%
								Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100	100	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah					
18	1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65,775,020	62,432,500	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	27	unit	100%
								Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100	100	persen	100%	
								Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	100	persen	100%	
								Kelompok Sasaran	Penunjang urusan pemerintah					
						<b>NON URUSAN</b>	<b>1,288,083,170</b>	<b>1,179,689,183</b>						

No	KODE				Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN				Capaian %	
						Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi		Satuan
1	2				3	4	5	6		7	8	9	10
<b>B</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>218,600,960</b>	<b>213,805,310</b>						
<b>VII</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18,228,360</b>	<b>15,665,660</b>						
19	1	06	02	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	18,228,360	15,665,660	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	12	dokumen	100%
								Hasil	jumlah izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan	100	100	persen	100%
								Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				
<b>VIII</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200,372,600</b>	<b>198,139,650</b>						
20	1	06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8,623,700	8,545,300	Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	104	104	orang	100%
								Hasil	persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan	100	100	persen	100%
								Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				
21	1	06	02	2.03	03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25,673,000	25,360,050	Keluaran	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3718	3718	keluarga	100%
								Hasil	persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan	100	100	persen	100%
								Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				
22	1	06	02	2.03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	161,994,500	160,251,000	Keluaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9	9	lembaga	100%
								Hasil	persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan	100	100	persen	100%
								Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				

No	KODE					Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN				Capaian %	
							Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi		Satuan
1	2					3	4	5	6		7	8	9	10
23	1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4,081,400	3,983,300	Keluaran	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	sertifikat	100%
									Hasil	persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	bidang sosial				
C	1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>564,371,080</b>	<b>519,059,717</b>						
IX	1	06	04	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>420,635,700</b>	<b>394,301,800</b>						
24						Penyediaan Permakanan	410,666,800	384,638,800	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	133	133	orang	100%
									Hasil	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Terlantar, dan Anak Terlantar	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	persen	100%
										Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase Orang terlantar yang tertangani	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	bidang sosial				
25						Penyediaan Sandang	3,200,000	3,080,000	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	orang	100%
									Hasil	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Terlantar, dan Anak Terlantar	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%

No	KODE					Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN				Capaian %	
							Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi		Satuan
1	2					3	4	5	6		7	8	9	10
										Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	persen	100%
										Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	Persentase Orang terlantar yang tertangani bidang sosial	100	100	persen	100%
26						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	6,768,900	6,583,000	Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	21	21	orang	100%
									Hasil	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Dasar	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	persen	100%
										Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase Orang terlantar yang tertangani bidang sosial	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran					
X	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	143,735,380	124,757,917						
27	1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	22,057,600	21,418,152	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	985	688	orang	186.34
									Hasil	persentase keluarga PPKS yang dibina	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	persen	100%
										Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase Orang terlantar yang tertangani bidang sosial	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran					
28	1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	9,604,700	6,414,000	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	7	orang	585.71

No	KODE					Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN				Capaian %	
							Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi		Satuan
1	2					3	4	5	6		7	8	9	10
									Hasil	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Terlantar, dan Anak Terlantar	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	persen	100%
										Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase Orang terlantar yang tertangani	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	bidang sosial				
29	1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	80,856,520	68,687,765	Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	orang	100%
									Hasil	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Terlantar, dan Anak Terlantar	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	persen	100%
										Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase Orang terlantar yang tertangani	100	100	persen	100%
									Kelompok Sasaran	bidang sosial				
30	1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	31,216,560	28,238,000	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	1	dokumen	100%
									Hasil	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Terlantar, dan Anak Terlantar	100	100	persen	100%
									Capaian Program	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%
										Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	persen	100%
										Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	persen	100%

No	KODE				Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	BELANJA		HASIL/ KELUARAN				Capaian %	
						Anggaran	Realisasi	Indikator		Rencana	Realisasi		Satuan
1	2				3	4	5	6		7	8	9	10
									Persentase Orang terlantar yang tertangani	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				
D	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	423,898,730	378,023,756						
XI	1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	423,898,730	378,023,756						
31	1	06	05	2.02	01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90,630,820	89,720,556	Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1528	1725	orang	113%
								Hasil	Persentase data error DTKS	6.33	3.19	persen	149.61%
								Capaian Program	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	100	100	persen	100%
									Persentase fakir miskin yang ditangani	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				
32	1	06	05	2.02	03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	333,267,910	288,303,200	Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	2125	orang	142%
								Hasil	Persentase data error DTKS	6.33	3.19	persen	149.61%
								Capaian Program	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	100	100	persen	100%
									Persentase fakir miskin yang ditangani	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				
E	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	73,274,400	60,938,400						
XII	1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	53,914,000	43,218,800						
33	1	06	06	2.01	01 Penyediaan Makanan	45,955,000	36,689,800	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1000	orang	100%
								Hasil	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	persen	100%
								Capaian Program	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	persen	100%
								Kelompok Sasaran	bidang sosial				





## DATA PENYUSUNAN LAKIP KOTA SOLOK TAHUN 2023

OPD/UNIT KERJA : Dinas Sosial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		KETERANGAN	
		Target	Realisasi		
<b>III</b>	<b>MISI III : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN PERLINDUNGAN</b>				
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	- Angka Kemiskinan	2.47	3.02	Data sementara, masih menggunakan data tahun 2022 dari Solok dalam angka Tahun 2023
		- Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	8.58	33	a Program/kegiatan a. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL b. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
					b Prestasi yang diraih : Selama tahun 2023 Dinas Sosial tidak mempunyai prestasi
		- Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	100%	PSKS target sebanyak 3718 keluarga dan terealisasi sebanyak 3718 keluarga (100%)
		- Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya target sebanyak 18 orang dan terealisasi sebanyak 18 orang (100%)
		- Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	Lanjut usia terlantar target sebanyak 115 orang dan terealisasi sebanyak 115 orang (100%)
		- Persentase gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social	100%	100%	Gelandang dan pengemis target sebanyak 25 orang dan terealisasi sebanyak 25 orang (100%)
		- Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	Anak terlantar target sebanyak 60 orang dan terealisasi sebanyak 60 orang (100%)
		- Persentase Orang terlantar yang tertangani			Orang terlantar yang tertangani target sebanyak 24 orang dan terealisasi sebanyak 7 orang (29%) Realisasi berdasarkan jumlah orang terlantar terjaring di Kota Solok

**Catatan :**

- Kolom keterangan diisi dengan program, kegiatan, anggaran yang direncanakan dan terealisasi serta keluaran dan hasilnya yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis
- Sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2020
- Target adalah target yang terdapat dalam RPJMD

Solok, Januari 2024  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SOLOK**

**ZULFADLI, SH, MP**  
Nip. 19640129 199901 1 001